

PERAN GURU PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER TANGGUNG JAWAB DI KELAS VIII SMP PLUS TANWIRUL ULUM KECAMATAN UMBULSARI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2025

Jarwo Tri Saputra¹

Universitas PGRI Argopuro Jember

Email: Jarwotrisaputra@gmail.com

Peni Catur Renaningtyas²

Universitas PGRI Argopuro Jember

Email : penicaturrenaningtyas@gmail.com

ST Fanatus Syamsiyah³

Universitas PGRI Argopuro Jember

Email : Fannah.miq@gmail.com

Abstrak

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mempunyai peran penting dalam membentuk karakter siswa, terutama dalam menumbuhkan sikap tanggung jawab sebagai bagian dari upaya mencetak warga negara yang cerdas, demokratis, dan berintegritas. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menguraikan peran guru PPKn dalam menanamkan karakter tanggung jawab pada murid kelas VIII SMP Plus Tanwirul Ulum, Desa Umbulsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember. Pendekatan yang dipakai ialah kualitatif dengan jenis deskriptif naratif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, setelah itu dianalisis melalui tahap pengumpulan, kondensasi, penyajian, penarikan kesimpulan, dan verifikasi, dengan uji keabsahan data memakai teknik triangulasi. Hasil penelitian mengungkap bahwa guru PPKn berperan dalam mengintegrasikan nilai tanggung jawab ke dalam kegiatan pembelajaran, di dalam atau di luar kelas. Proses pembentukan karakter ini diperkuat melalui keteladanan guru, penerapan tata tertib, serta pemanfaatan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan strategi pembelajaran Contextual Teaching and Learning. Secara keseluruhan, peran guru dalam menanamkan tanggung jawab pada siswa berjalan efektif, yang terlihat dari kemampuan siswa menyelesaikan tugas tepat waktu, mengikuti petunjuk dengan benar, serta mengerjakan tugas secara mandiri.

Kata Kunci: Pendidikan PPKn, karakter tanggung jawab, peran guru, pembentukan karakter, strategi pembelajaran.

Abstarct

Saputra, Jarwo T. 2025 "The Role of Pancasila and Citizenship Education Teachers in the Formation of Responsible Character in Class VIII of SMP Plus Tanwirul Ulum, Umbulsari District, Jember Regency in 2025". Thesis, Pancasila and Citizenship Education Study Program, Faculty of Teacher Training and Education, PGRI Argopuro University, Jember. Dr. Peni Catur Renaningtyas, M.Pd., St. Fanatus Syamsiyah, S.H.I., M.Si.

Pancasila and Citizenship Education plays an important role in shaping students' character, particularly in fostering a sense of responsibility as part of the effort to produce intelligent, democratic, and integrity-minded citizens. This study aims to describe the role of PPKn teachers in instilling a sense of responsibility in eighth-grade students of SMP Plus Tanwirul Ulum, Umbulsari Village, Umbulsari District, Jember Regency. The approach used was qualitative with a descriptive narrative approach. Data were obtained through observation, interviews, and documentation, then analyzed through the stages of collection, condensation, presentation, drawing conclusions, and verification, with data validity testing using triangulation techniques. The results of the study revealed that PPKn teachers play a role in integrating the value of responsibility into learning activities, both inside and outside the classroom. This character-building process is strengthened through teacher role models, the implementation of discipline, and the use of lecture methods, discussions, questions and answers, assignments, and Contextual Teaching and Learning learning strategies. Overall, the role of teachers in instilling responsibility in students is effective, as seen from the students' ability to complete assignments on time, follow instructions correctly, and complete assignments independently.

Keywords: Civic Education, responsibility character, teacher role, character formation, learning strategies.

Pendahuluan

Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan dan Pancasila merupakan pelajaran di sekolah yang seharusnya menekankan pada pengembangan karakter, di mana fokus utama kurikulum beralih ke cara menjadi masyarakat yang dapat ikut serta secara produktif, intelektual, demokratis, dan bertanggung jawab. Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PPKn ialah upaya yang bertujuan memfasilitasi peserta didik dengan wawasan serta keterampilan pokok mengenai korelasi antara masyarakat dengan negara, sekaligus memberikan pendidikan pendahuluan bela negara (PPBN). Oleh sebab itu, diharapkan peserta didik bisa tumbuh menjadi masyarakat yang bisa dipercaya dan diandalkan oleh bangsa serta NKRI.

Menurut (Nabila N.H, 2022) PPKn bertujuan untuk memperoleh 2 tujuan yang setara. Tujuan pertama adalah meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa dalam moralitas, serta dasar-dasar kehidupan nasional dan negara. Kedua, membentuk kepribadian, sikap serta perilaku yang tepat dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Agar siswa dapat memahami berbagai ide dan prinsip ilmiah dan menerapkannya di keseharian, kedua tujuan ini harus diraih secara bersamaan. Tanpa diragukan lagi, guru Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan sendiri memiliki peran terhadap tujuan-tujuan ini.

Pendidikan dasar dan menengah diselenggarakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Pelaksanaan pendidikan ini mempunyai tujuan utama yaitu 1) beriman dan

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur, 2) berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif, 3) sehat, mandiri, dan percaya diri, dan 4) toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab (Samani, 2019). Penjelasan tersebut menegaskan bahwa pendidikan di Indonesia menekankan aspek kognitif, aspek sikap dan psikomotorik.

Menurut (Marnelizah, 2021) Salah satu definisi guru adalah seseorang yang bertugas mendidik masyarakat di semua bidang, termasuk intelektual, fisik, spiritual, dan emosional. (Karso, 2019) guru merupakan pendidik ahli yang mempunyai tugas pokok meliputi mendidik, mengajar, memimpin dan mengevaluasi siswa dalam PAUD, pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen). Menurut KBBI, peran seorang guru bukan hanya hanya terbatas pada menyampaikan pengetahuan; mereka juga bertanggung jawab untuk membentuk karakter siswa dengan memberikan arahan berupa perilaku, dan contoh, sehingga siswa dapat mengembangkan karakter moral serta membedakan antara salah dan benar. Guru dapat mengendalikan siswa hingga batas tertentu karena mereka adalah pemimpin.

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3, memaparkan peran penting tenaga ahli di bidang pendidikan. Pengaturan ini menunjukkan mengurikan Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila (PPKn) mempunyai tujuan yang berguna mengembangkan karakter yang bertanggung jawab selain transfer informasi. Hal tersebut sangat krusial dikarenakan PPKn mencakup materi yang dimaksudkan untuk memberikan siswa rasa tanggung jawab yang kuat. Maka karena itu, kemampuan guru dalam menyajikan dan mengatur materi pelajaran serta mengawasi kelas memiliki dampak yang signifikan terhadap proses pembelajaran. Efektivitas instruksi guru mendukung kesuksesan kegiatan belajar mengajar di kelas, yang dasarnya merupakan kesuksesan pembelajaran siswa.

Peran guru berdasarkan studi literatur terhadap pandangan menurut (Zulfatunnisa, 2022), ialah:

- a. Guru sebagai dinamisator, diperlukan kemampuan dalam melakukan pengawasan pada aktifitas dan ketertiiiban kelas.
- b. Guru sebagai motivator, diperlukan kemampuan guru memotivasi belajar siswa di kelas.
- c. Guru sebagai evaluator, harus mempunyai keterampilan menilai siswa secara objektif, berkelanjutan, dan komprehensif.
- d. Guru sebagai administrator, Guru bertanggung jawab atas pengelolaan sekolah, termasuk mengisi dokumen-dokumen terkait kehadiran siswa, nilai, rapor, kurikulum, evaluasi, dan lain sebagainya.
- e. Guru sebagai fasilitator, Tugas pokok guru ialah mendukung proses belajar siswa.

Kewajiban guru di uraikan dalam Bab XI Pasal 39 Ayat (2) UUD No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 20 UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta pasal 52 Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru, yakni:

- a. Merencanakan pembelajaran
- b. Melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu
- c. Menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran
- d. Membimbing dan melatih peserta didik/siswa
- e. Melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- f. Melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada kegiatan pokok yang sesuai
- g. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan.

Pendidikan karakter ialah usaha yang dilakukan dengan sengaja untuk membimbing individu agar mampu memahami, memelihara, serta mengimplementasikan nilai-nilai karakter dikeseharian. Tanpa upaya bijaksana oleh para pemangku pendidikan, pendidikan karakter tidak dapat berkembang secara alami. Pendidikan karakter tidak dapat menciptakan orang-orang cerdas yang menggunakan kecerdasan mereka untuk bertindak dan berperilaku dengan cara yang tepat tanpa upaya yang cerdas (Samani, 2019).

Setiap guru di sekolah memiliki kewajiban untuk membantu siswa meningkatkan pendidikan karakter mereka. Perlu ditekankan bahwa masih terdapat persepsi yang kurang tepat yang menempatkan guru Pendidikan Agama dan guru PPKn sebagai pihak yang sangat berkontribusi serta bertanggung jawab pada pendidikan karakter. Meskipun nilai moral dan karakter bagian dari kedua mata pelajaran tersebut, pada hakikatnya seluruh pendidik mempunyai tanggung jawab yang sama dalam menggabungkan pendidikan karakter disetiap pelajaran di sekolah. Hal ini karena pendidikan karakter ialah tanggung jawab bersama antar semua pendidik, keluarga serta masyarakat, yang semuanya harus membantu siswa mengembangkan karakter moral mereka.

Pendidikan telah digunakan untuk mencoba mengembangkan karakter yang bertanggung jawab, namun dalam praktiknya, tidak semua sekolah fokus pada pengembangan karakter. Banyak siswa terus mengabaikan kewajiban mereka sebagai akibatnya. Karena siswa mewakili generasi masa depan negara, pendidikan karakter bertujuan untuk menanamkan rasa tanggung jawab kewarganegaraan pada mereka. Keterampilan untuk menjalankan kewajiban serta tanggung jawab yang di percayakan pada mereka itulah yang dimaksud dengan tanggung jawab. Karena tanggung jawab dalam belajar mendorong kematangan dalam kegiatan pendidikan, hal ini sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengajar PPKn. Selain itu, akuntabilitas menumbuhkan kepercayaan diri dan membantu dalam pemecahan masalah.

Pendidikan karakter yang mencakup pendidikan moral dan nilai-nilai kebangsaan harus dianggap sebagai suatu usaha yang terencana serta sistematis, bukan sebagai peristiwa yang terjadi secara kebetulan. Maka, pendidikan karakter ialah ikhtiar serius untuk mengerti, membentuk, serta menumbuhkan prinsip-prinsip moral, baik bagi individu maupun bagi seluruh anggota masyarakat dan bangsa (Thomas Lickona, 1991).

Sukiman (2016) tanggung jawab berarti mengerjakan kewajiban dengan serius dan siap memikul segala konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Oleh sebab itu, tanggung jawab dapat dipahami sebagai kemampuan individu dalam memikul sekaligus melaksanakan tugas maupun kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya.

Menurut A. Fitri (2023), beberapa yang menjadi tolak ukur indeks karakter tanggung jawab meliputi:

1. Menyelesaikan tugas dengan benar,
2. Bertanggung jawab tentang semua tindakan,
3. Menjalankan kewajiban piket sesuai jadwal
4. Melaksanakan tugas kelompok dengan bekerja sama dengan seluruh anggota.

Menurut (Narwanti, 2018) tanggung jawab dilihat dari bentuknya terdiri atas: tanggung jawab kepada diri sendiri, tanggung jawab kepada masyarakat, dan tanggung jawab kepada Tuhan. Adapun faktor yang mempengaruhi sikap tanggung jawab menurut (Aisyah, 2014) sebagai berikut:

- a. Rendahnya pemahaman siswa terhadap pentingnya menjalankan hak dan kewajiban sebagai bentuk tanggung jawab.

- b. Rendahnya rasa percaya diri dalam memanfaatkan potensi yang dipunya.
- c. Layanan bimbingan dan konseling oleh guru BK untuk mengurus perilaku tanggung jawab di kelas belum berjalan optimal.

Peran guru PPKn pada membangkitkan sikap nasionalisme siswa adalah dengan melaksanakan kegiatan pembinaan peserta didik yang berbudi luhur serta mempertahankan pada nilai nasionalisme. Upaya memperkuat nasionalisme dilakukan dengan menanamkan kembali jati diri siswa sehingga lahir jati diri yang kokoh dan berakhlak mulia. Melalui tahapan perencanaan, persiapan, dan kegiatan pembelajaran, guru berupaya menanamkan pada murid - muridnya rasa kebersamaan dan solidaritas, tanggung jawab, kepercayaan diri, dan disiplin. Guru Pendidikan Kewarganegaraan berkolaborasi dengan guru mata pelajaran lain, konselor bimbingan, kepala sekolah serta orang tua dalam upaya-upaya ini (Kartika, 2016).

Penyampaian materi di kelas pada dasarnya merupakan tugas guru, namun ada tanggung jawab lain yang juga harus diemban. Untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, guru juga harus membimbing, mendampingi, melatih, dan mendidik mereka di dalam kelas. Menciptakan prosedur pembelajaran yang lebih menarik, menyenangkan, menantang, dan merangsang kemampuan berpikir kritis merupakan tanggung jawab guru pendidikan kewarganegaraan (Beno et al., 2022)

Selain mengajarkan materi pelajaran, guru pendidikan kewarganegaraan di SMP Plus Tanwirul Ulul juga berupaya memberikan contoh positif bagi siswa dalam mengembangkan karakter yang bertanggung jawab. Inilah cara mereka melaksanakan tugas dalam membentuk karakter yang bertanggung jawab. Siswa mampu memahami dan menerapkan pentingnya karakter yang bertanggung jawab bagi diri mereka sendiri sebagai hasilnya.

Selain mengajarkan materi pelajaran, guru pendidikan kewarganegaraan di SMP Plus Tanwirul Ulul juga berupaya memberikan contoh positif bagi siswa dalam mengembangkan karakter yang bertanggung jawab. Inilah cara mereka melaksanakan tugas dalam membentuk karakter yang bertanggung jawab. Siswa mampu memahami dan menerapkan pentingnya karakter yang bertanggung jawab bagi diri mereka sendiri sebagai hasilnya.

Berdasarkan temuan wawancara peneliti dengan guru PPKn, guru PPKn memegang peranan penting dalam membantu siswa mengembangkan rasa tanggung jawab dengan memberikan nasihat dan motivasi agar mereka mengikuti aturan dan peraturan di sekolah. Hal ini karena guru bukan hanya memiliki tugas mengajar di dalam kelas, namun juga menjadi pembimbing dan pelatih siswa di sana (Hartini & Ekaristi, 2021.) Pernyataan tersebut memperkuat pandangan bahwa guru merupakan tenaga ahli yang memegang tanggung jawab dalam melaksanakan tugas mendidik, membimbing serta mengevaluasi siswa di jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan formal, pendidikan dasar, maupun pendidikan menengah (Damayanti & Asbari, 2024).

Guru PPKn juga bekerja keras di luar kelas untuk memberikan bantuan pada anak-anak untuk mengembangkan nilai karakter tanggung jawab, selain melakukannya di kelas selama proses pembelajaran. Menegur siswa di sekolah adalah salah satu upaya tersebut. Guru memeriksa setiap pagi untuk memastikan siswa menyelesaikan tugas tanggung jawab di kelas sebagai bagian dari langkah-langkah yang diambil. Guru akan menegur siswa yang tidak menyelesaikan tugas yang diberikan untuk mencegah mereka melakukannya di masa depan. Hukuman juga akan diterapkan jika ada pelanggaran aturan lain di sekolah, seperti keterlambatan atau pelanggaran hak dan tanggung jawab.

Berdasarkan pernyataan ini, dapat dibuktikan bahwa guru pendidikan kewarganegaraan dapat berperan dalam menanamkan sikap tanggung jawab peserta didik, pada aktifitas di luar

atau di sekolah. Hal ini dianggap bermanfaat bagi perkembangan siswa dalam memahami dan memenuhi kewajiban mereka (Hartini & Ekaristi, 2021.)

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menempatkan peneliti sebagai human instrument (Miles, Huberman & Saldana, 2014) untuk mengumpulkan data primer melalui observasi, wawancara, dan catatan lapangan, serta data sekunder dari dokumen sekolah, modul ajar, dan portofolio siswa. Penelitian dilaksanakan di SMP Plus Tanwirul Ulum Jember dengan subjek guru PPKn, kepala sekolah, dan siswa kelas VIII. Teknik pengumpulan data mencakup: (1) Observasi, di mana peneliti mengamati proses pembelajaran PPKn dan interaksi guru-siswa baik dalam situasi formal maupun non-formal; (2) Wawancara, dilakukan secara mendalam kepada guru, siswa, dan kepala sekolah untuk menggali persepsi mereka; serta (3) Dokumentasi, mencakup dokumen resmi sekolah, foto, dan catatan kegiatan. Analisis data mengikuti model interaktif Miles, Huberman & Saldana (2014), yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan validitas dijaga melalui triangulasi metode, sumber, dan teori (Rahardjo, 2010). Dengan tahapan penelitian yang sistematis mulai dari pra-lapangan, pengumpulan data, analisis, hingga pelaporan (Tampubolon, 2023), temuan diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran guru dalam pembentukan karakter tanggung jawab siswa.

Pembahasan

1) Peran guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam pembentukan karakter tanggung jawab di kelas VIII SMP Plus Tanwirul Ulum

SMP Plus Tanwirul Ulum adalah salah satu sekolah SMP berstatus Swasta di Jl KH. Munawwar No.01, Umbulsari, Kec. Umbulsari, Kab. Jember, Jawa Timur. SMP Plus Tanwirul Ulum dibangun pada tanggal 9 November 2015 dengan Nomor SK Pendirian 421.5/244/413/2015 bernaung di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada proses pembelajaran, sekolah ini mempunyai 210 siswa yang dididik oleh 12 guru yang ahli pada bidangnya. Kepala Sekolah SMP Plus Tanwirul Ulum saat ini ialah Hujjatul Balighoh S.Pd.I. Sekolah ini terakreditasi B dengan Nomor SK Akreditasi 133/BAN-S/M.35/SK/X/2018 pada tanggal 24 Oktober 2018. Sekolah ini berkomitmen untuk memberikan pendidikan berkualitas kepada para siswanya dengan kurikulum yang terstruktur dan metode pengajaran yang efektif. Serta banyak alumni yang melanjutkan ke jenjang SMA/SMK negeri ataupun swasta. (Observasi profil sekolah, 20 Oktober 2024).

Penelitian mengenai peran guru PPKn dalam menciptakan karakter tanggung jawab di SMP Plus Tanwirul Ulum Jember memperlihatkan adanya hubungan erat antara praktik pembelajaran PPKn dengan pengembangan nilai tanggung jawab pada murid. Hasil observasi dan wawancara memperlihatkan bahwa meskipun guru PPKn telah berupaya menanamkan karakter tanggung jawab, masih terdapat hambatan berupa rendahnya motivasi siswa, kurangnya variasi metode pembelajaran, serta minimnya kesadaran siswa dalam melaksanakan kewajiban.

Pendidikan Kewarganegaraan bukan sekadar transfer pengetahuan, melainkan sarana pembentukan karakter bangsa. Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003, tujuan PPKn ialah memfasilitasi murid agar memiliki wawasan, keterampilan dasar, serta kesadaran bela negara sehingga lahir warga negara yang bertanggung jawab. Dalam praktiknya, guru PPKn di SMP Plus Tanwirul Ulum berperan bukan hanya sebagai pengajar materi, namun sebagai pembimbing, motivator, dan teladan bagi siswa.

Peran guru sebagaimana dikemukakan Zulfatunnisa (2022) mencakup peran sebagai 1) Dinamisator guru berperan penting dalam membimbing siswa, yang sudah memiliki tujuan yang jelas atau belum, agar perkembangan mereka dapat berlangsung optimal., 2) Motivator guru berupaya membangkitkan semangat, etos belajar, dan potensi yang dimiliki

siswa melalui pendekatan personal, 3) Evaluator guru berperan aktif dalam mengevaluasi sikap dan perilaku yang harus ditampilkan oleh guru agar menjadi tauladan pada peserta didik, 4) Administrator, sebagai administrator, guru bertanggung jawab terhadap pengelolaan segala aspek yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran, dan 5) Fasilitator, berperan dalam membimbing, memotivasi, dan menyediakan sarana yang diperlukan agar siswa dapat aktif mengembangkan pengetahuannya sendiri. Hal ini selaras dengan temuan penelitian yang memperlihatkan guru PPKn tidak hanya mengajar, tetapi juga menegur, mengawasi, serta memberi contoh langsung perilaku bertanggung jawab.

Konsep tanggung jawab dalam pendidikan karakter menuntut siswa untuk menyelesaikan tugas dengan baik, berani menanggung konsekuensi, serta disiplin dalam melaksanakan kewajiban (Sukiman, 2016; A. Fitri, 2023). Namun, observasi lapangan menunjukkan masih ada siswa yang tidak menyelesaikan tugas, menunda pekerjaan rumah, bahkan mencontek pekerjaan teman. Fakta ini menandakan bahwa nilai tanggung jawab belum sepenuhnya terinternalisasi pada diri siswa.

Narwanti (2018) menyebutkan bahwa tanggung jawab memiliki tiga bentuk, yakni terhadap 1) Diri sendiri, 2) Masyarakat, dan 3) Tuhan. Dalam konteks sekolah, guru PPKn telah berusaha menanamkan ketiga bentuk tanggung jawab tersebut, misalnya melalui disiplin piket kelas (tanggung jawab kepada diri dan masyarakat) serta kegiatan keagamaan (tanggung jawab kepada Tuhan). Akan tetapi, kurangnya pemahaman siswa terhadap pentingnya hak dan kewajiban (Aisyah, 2014) masih menjadi faktor penghambat.

2) Metode pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang efektif dalam pembentukan karakter tanggung jawab di kelas VIII SMP Plus Tanwirul Ulum

Setelah menerapkan berbagai teknik dan strategi pengajaran yang menghibur dan mendorong antusiasme serta motivasi siswa selama proses pembelajaran, siswa kelas VIII SMP Plus Tanwirul Ulum (SMP Plus Tanwirul Ulum) mengembangkan karakter bertanggung jawab melalui peran guru PPKn. Hasil ini selaras dengan teori yang dikemukakan oleh (Dr. M. Sobry Sutikno, 2019). Sebagai berikut:

a. Metode Ceramah

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, guru PPKn di SMP Plus Tanwirul Ulum kerap menggunakan metode ceramah dalam setiap pertemuan pembelajaran. Melalui metode ini, guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga menanamkan nilai tanggung jawab dengan cara menjelaskan pentingnya menepati janji, menyelesaikan tugas tepat waktu, serta berani menerima konsekuensi dari setiap tindakan.

b. Metode Tanya Jawab

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa guru PPKn menerapkan metode tanya jawab untuk mendorong keterlibatan aktif siswa. Strategi ini dipakai untuk menggali pemahaman, melatih keberanian, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis lewat interaksi dua arah.

c. Metode Diskusi

Dalam kegiatan ini, guru memberikan peluang siswa untuk saling bertukar pendapat, berbagi pengalaman, serta bersama-sama menemukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai materi yang dipelajari.

d. Metode Penugasan

Hasil observasi dan wawancara juga mengungkapkan bahwa setelah menjelaskan materi pada setiap bab, guru PPKn selalu memberikan penugasan kepada siswa. Penugasan ini berfungsi sebagai sarana evaluasi, baik dalam bentuk tes tertulis maupun lisan, untuk mengukur sejauh mana siswa memahami materi. Di samping itu, guru juga memberikan PR sebagai bentuk latihan di luar kelas, yang sekaligus menjadi cara untuk melihat tanggung jawab siswa dalam menyelesaikan tugas individu maupun kelompok. Sehingga, penugasan bukan berfungsi hanya sebagai alat penilaian akademik, namun juga sebagai sarana pembentukan sikap tanggung jawab.

Berdasarkan hasil observasi pada proses pembelajaran PPKn di kelas serta hasil wawancara terhadap informan sebagai guru mata pelajaran PPKn di SMP Plus Tanwirul Ulum dalam penyampaian materi, guru PPKn memanfaatkan berbagai media pembelajaran, seperti proyektor untuk menampilkan materi, serta gambar dan video yang berkaitan dengan tema yang dibahas. Di samping itu, guru kerap menyelipkan permainan atau kegiatan *ice breaking*. Penggunaan permainan memiliki tujuan untuk menciptakan kondisi belajar yang dinamis. Hal ini mendukung gagasan yang dikemukakan oleh (Dr. M. Sobry Sutikno, 2019) dan data yang ditemukan peneliti di lapangan.

Dalam proses mengajar, guru PPKn di SMP Plus Tanwirul Ulum menerapkan strategi CTL. Melalui pendekatan ini, materi disampaikan dengan menghubungkannya pada situasi nyata yang dekat dengan kehidupan siswa, sehingga konsep dapat dipahami secara kontekstual. Pembelajaran dirancang untuk melibatkan siswa dalam menemukan materi yang dipelajari dengan mandiri, lalu mengaitkannya dengan pengalaman dan realitas sehari-hari, sehingga mendorong mereka untuk mempraktikkannya dalam kehidupan nyata. Strategi ini menekankan pada penerapan langsung informasi yang diperoleh melalui proses penemuan yang relevan dengan dunia nyata, selaras dengan teori yang digunakan peneliti, yaitu teori yang dikemukakan oleh (Wahyudin Nur, 2017).

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam membentuk karakter tanggung jawab di kelas VIII SMP Plus Tanwirul Ulum Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember Tahun 2025, diperoleh temuan bahwa peserta didik memperlihatkan sikap tanggung jawab yang tercermin melalui perilaku disiplin dalam mengikuti kegiatan serta kepatuhan terhadap tata tertib sekolah. Salah satu bentuk implementasi tanggung jawab siswa terlihat dari kebiasaan hadir di sekolah tepat waktu. Selain itu, karakter tanggung jawab juga tampak ketika siswa menyerahkan tugas PPKn sesuai yang di jadwalkan guru, mengerjakannya berdasarkan petunjuk yang diberikan, serta menyelesaikannya secara mandiri tanpa menyalin pekerjaan teman. Hal ini sependapat dengan indikator yang di angkat oleh (Riyady Aji Pamungkas, 2017).

Pembentukan karakter tanggung jawab sudah terlihat dilaksanakan dengan baik di SMP Plus Tanwirul Ulum berdasarkan contoh yang dipaparkan sebelumnya, terlihat bahwa siswa menunjukkan sikap tanggung jawab ketika diberi amanah menyelesaikan tugas dari guru, yaitu dengan menyerahkan tepat waktu, mengikuti petunjuk yang diberikan, serta mengerjakannya secara mandiri tanpa menyalin pekerjaan orang lain.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa guru PPKn di SMP Plus Tanwirul Ulum memiliki peran sentral dalam pembentukan karakter tanggung jawab siswa. Proses tersebut meliputi pengintegrasian nilai-nilai sikap dalam kegiatan belajar, serta memperhatikan komponen penting seperti modul ajar, metode, dan teknik evaluasi yang mendalam. Dalam hal ini, guru berperan sebagai evaluator yang dinamis, fasilitator, sekaligus motivator yang mendorong peserta didik untuk mengembangkan sikap tanggung jawab.

Dalam membentuk karakter tanggung jawab siswa kelas VIII SMP Plus Tanwirul Ulum dilakukan guru PPKn dengan cara menghubungkan nilai-nilai karakter ke setiap tahap pembelajaran, dari kegiatan pendahuluan, inti, hingga penutup. Dalam praktiknya, guru menggunakan beragam metode, seperti ceramah yang hubungkan dengan materi pelajaran, diskusi, tanya jawab, dan latihan, untuk membiasakan siswa bertanggung jawab pada tugas yang amanatkan. Juga, guru menerapkan strategi permainan (*ice breaking*) dan pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) guna terciptanya suasana belajar yang menyenangkan sekaligus bermakna, sehingga nilai tanggung jawab dapat tertanam secara lebih efektif dalam diri siswa.

Daftar Pustaka

- Aisyah, A., Nusantoro, E., & Kurniawan, K. (2014). Meningkatkan Tanggung Jawab Belajar Melalui Layanan Penguasaan Konten. *Indonesian Journal of Guidance and Counseling: Theory and Application*, 3(3), 44–50. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jbk>
- Beno, J., Silen, A. ., & Yanti, M. (2022). Peran guru PPKn dalam pembentukan sikap tanggung jawab pada peserta didik.
- Farcha, A. R., Fitri, A., & Safiah, I. (2023). Peran Guru dalam Menerapkan Karakter Tanggung Jawab Siswa Di SDN 1 Jeumpang Kabupaten Aceh Besar. *Elementary Education Resarch*, 8(1), 83–88. <http://www.jim.unsyiah.ac.id/pgsd/index>
- Hafidhuddin, D. (2012). Konsep Pendidikan Karakter Berbasis Pendidikan Agama. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2).
- Kartika, D. I. M. (2016). Peranan guru PPKn Dalam Mengembangkan Sarater dan Sikap Nasionalisme Pada Siswa Dwijendra Denpasar. *Jurnal Kajian Pendidikan Widya Accarya FKIP Universitas Dwijendra*, 3(1), 67–76. <http://ejournal.undwi.ac.id/index.php/widyaaccarya/article/view/232>
- Marnelizah, M. (2021). Karakteristik guru yang efektif dalam pembelajaran.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. 3rd. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode penelitian kualitatif*, cetakan ke-36, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 6.
- Nabila, N. H., Zahrah, F., & Santoso, G. (2022). Pembentukan Karakter Tanggung Jawab Melalui Peran Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 01(02), 39–50. <https://jupetra.org/index.php/jpt/article/view/459%0Ahttps://jupetra.org/index.php/jpt/article/download/459/234>
- Narwanti. (2018). *Teori Tanggung Jawab*. Repository Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 1–17. https://repository.iainkudus.ac.id/263/5/05_BAB_II.pdf

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. (2010, 28 Januari). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105. Diundangkan tanggal 28 Januari 2010
- Rahardjo, M. (2010). Triangulasi dalam penelitian kualitatif.
- Samani, D. R. M. (2019). Konsep dan model pendidikan karakter.
- Tampubolon, M. (2023). Metode Penelitian Metode Penelitian. Metode Penelitian Kualitatif, 3(17), 43. http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB_III.pdf
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (2003, 8 Juli). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301. Diundangkan tanggal 8 Juli 2003.
- Thomas, E. (n.d.). Lickona (1991). Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility. Bantam Books, New York.
- Zulfatunnisa. (2022). Pentingnya Peran Guru Dalam Proses Pembelajaran.